

Komunikasi Penanggulangan Risiko Wabah Covid-19 di Provinsi Banten

Idoh Hafidoh*, Nina Yuliana, Ail Muldi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Correspondence email: ihafidoh3@gmail.com

Abstrak. Virus Covid-19 telah menyebar ke wilayah Indonesia termasuk Provinsi Banten yang menyebabkan dampak multidimensi dari berbagai sektor diantaranya kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam penanggulangan risiko Covid-19, memerlukan pendekatan komunikasi risiko yaitu pertukaran informasi dan pandangan mengenai suatu risiko diantara para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri, peneliti/akademisi, media massa, dan masyarakat yang tergabung dalam Satgas Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi risiko pemerintah Provinsi Banten dengan para pemangku kepentingan serta pemanfaatan media promosi kesehatan dalam penanggulangan risiko wabah Covid-19. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan model komunikasi risiko William Leiss. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemprov Banten melibatkan lima stakeholder yaitu pemerintah, industri, akademisi/peneliti, media massa, serta masyarakat, dan setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam penanggulangan risiko Covid-19. Saluran yang digunakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi sebagian besar dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp Grup. Namun pada praktiknya, pelaksanaan penanggulangan risiko Covid-19 di Provinsi Banten masih belum maksimal karena terdapat beberapa peran pemangku kepentingan yang kurang dilibatkan oleh Pemprov Banten. 2) Pemprov Banten menggunakan strategi media promosi kesehatan *above the line* dan *below the line* untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Covid-19. Namun, penyajian konten media untuk promosi kesehatan masih perlu ditingkatkan agar lebih kreatif, informatif, mengikuti trend dan opini publik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Kata kunci : Komunikasi Risiko; Pandemi Covid-19; Pemangku Kepentingan; Promosi Kesehatan; Satgas Covid-19 Provinsi Banten

Abstract. The Covid-19 virus has spread out to Indonesia including Banten Province which causes multidimensional impacts from various sectors such as health, social, economic, and education. In risk mitigation of Covid-19 epidemic, it requires a risk communication approach, that is information exchange and views among stakeholders such as governments, industry, researchers/academics, mass media, and the community who takes apart of the Covid-19 Task Force. This study aims to determine the implementation of risk communication between Provincial government of Banten and stakeholders as well as the utilization of public health promotion media of Covid-19 epidemic mitigation risk. The theoretical basis of this research applied risk communication model proposed by William Leiss. The research was conducted using a qualitative evaluative approach with a case study method. The results of this research are 1) The Provincial Government of Banten consists of five stakeholders, they are government, industry, academics/researchers, mass media, and communities, in which every stakeholder has their own role of Covid-19 mitigation risk. The application used to communicate and coordinate are mostly performed virtually through Zoom and WhatsApp Groups. However, in practice, the implementation of Covid-19 mitigation risk in Banten Province is still not optimal because several stakeholders are not being involved by The Provincial Government of Banten. 2) The Provincial Government of Banten uses the strategy of *above the line* and *below the line* concerning the health promotion media to socialize and educate the public about Covid-19. However, the set of media content for health promotion still needs to be improved to be more creative, informative, up to date and raise the public opinion, so that it can fulfil the information needs of the society.

Keywords : Risk Communication; Covid-19 pandemic; Stakeholders; Health Promotion; Banten Province Covid-19 Task Force

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang dilanda krisis karena penyebaran virus Covid-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan dalam rentang waktu 2 bulan mampu menginfeksi hingga 28 negara. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan virus Covid-19 sebagai darurat kesehatan global dan baru dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Ribuan manusia di seluruh dunia menjadi korban akibat terinfeksi virus ini. Mengutip data dari Worldometers per tanggal 11 Juli 2021, total kasus Covid-19 di dunia sudah mencapai angka 187.269.771 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 171.238.385 pasien sembuh dan sebanyak 4.042.867 orang meninggal

dunia. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi yaitu 34.677.728 kasus. Negara lainnya seperti India, Brazil, Prancis, Rusia, Turki, UK, Argentina, Columbia dan Italia masuk dalam daftar 10 negara dengan kasus terbanyak Covid-19 di dunia.

Virus tersebut juga menyebar ke wilayah Indonesia yang pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo dimana dua WNI terinfeksi virus Covid-19 yakni perempuan berusia 31 tahun beserta ibunya yang berusia 64 tahun (detik.com, 2020). Dilansir dari laman covid19.go.id per tanggal 11 Juli 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 2.491.006 kasus selama kurang lebih 1,5 tahun dengan total kasus kematian sebanyak 65.457

korban jiwa. Dari data tersebut, Worldometers (2021) mencatat Indonesia berada di peringkat ke-16 kasus terbanyak Covid-19 di dunia. Penyebaran virus Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Dimulai dari aspek ekonomi, International Monetary Fund (2020) melaporkan bahwa ekonomi dan keuangan global mengalami krisis karena konsumsi rumah tangga masyarakat mengalami penurunan. Kemudian di bidang pangan, laporan PBB (2020) menyatakan sebanyak 132 juta orang di seluruh dunia akan mengalami kelaparan karena dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mempengaruhi sistem pangan global dari mulai proses produksi, distribusi hingga konsumsi pangan.

Di bidang pendidikan, laporan dari UNICEF (2020) menyatakan sepertiga anak di seluruh dunia atau lebih tepatnya 463 juta anak mengalami kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh setelah kegiatan sekolah dihentikan akibat Covid-19. Pandemi ini dapat membawa konsekuensi jangka panjang terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak di seluruh dunia. Organisasi Buruh Dunia (ILO, 2020) juga melaporkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Melihat situasi pandemi Covid-19 yang terus menyebar, mendorong berbagai negara melakukan berbagai upaya dan mengambil kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Seperti di Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan dimana sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum. Kemudian pada awal Juni 2020, pemerintah menerapkan kebijakan tatanan normal baru atau new normal di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota. New normal diberlakukan di daerah dengan laju penyebaran virus Covid-19 yang sudah rendah. Tujuan diberlakukannya new normal adalah untuk memperkuat sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari Covid-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban PHK dan memperbaharui sosial ekonomi. Hingga saat ini, beberapa daerah di Indonesia masih bertarung melawan virus Covid-19 termasuk di Provinsi Banten. Per tanggal 11 Juli 2021, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Banten sudah mencapai 63.496 pasien dengan kasus kematian sudah menyentuh angka 1.625 orang (infocorona.bantenprov.go.id, 2021).

Berdasarkan analisis data Satgas Covid-19 Nasional per tanggal 4 Juli 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Banten mengalami kenaikan sebesar 99,6%, dimana sebagian besar kasus berasal dari Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun daerah dengan kenaikan kasus tertinggi adalah Kota Tangerang sebanyak 91,4% (513-982 kasus), Kab. Serang (0-250 kasus) dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 14,9%

(754-866 kasus). Kasus kematian di Provinsi Banten juga mengalami kenaikan sebanyak 20.8% dengan jumlah kematian kumulatif terbanyak terjadi di Kota Tangerang Selatan sebanyak 419 kasus yang sebagian besar korban jiwa berasal dari pasien berusia > 46 tahun (covid19.go.id, 2021). Dilihat secara geografis, Provinsi Banten merupakan wilayah yang dekat dengan titik episentrum Covid-19 yaitu Jakarta. Banten juga termasuk ke dalam wilayah jabodetabek dan letaknya berbatasan antara pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan letak geografis tersebut akan terjadi lalu lintas transportasi dan mobilitas penduduk dari berbagai wilayah. Hal inilah yang menyebabkan Banten masuk kategori Provinsi yang rentan terjadi penyebaran virus Covid-19.

Katadata Insight Center (KIC) merilis hasil Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19 dan menyebutkan Banten sebagai salah satu Provinsi yang paling rentan terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan provinsi lainnya (katadata.co.id, 2020). Tiga indikator risiko yang diukur berkaitan dengan karakteristik daerah, risiko kesehatan, dan mobilitas penduduk. Banten menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta dengan Indeks Kerentanan sebesar 45,5. Risiko terbesar yang dihadapi Banten adalah mengenai kondisi kesehatan penduduk dengan skor sub indeks 54,4. Tingginya risiko kesehatan di Banten disebabkan karena besarnya penduduk yang merokok, minimnya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, tingginya angka kesakitan, serta buruknya kualitas udara. Berkaitan dengan mobilitas penduduk dan karakteristik daerah, pekerja yang bekerja di luar kota termasuk ke Jakarta juga cukup banyak, sehingga Banten rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Berkaitan dengan kondisi layanan kesehatan provinsi dalam menghadapi Covid-19, Banten merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap Covid-19 ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai. Tingginya jumlah penduduk Banten tidak sebanding dengan kondisi layanan kesehatan yang relatif minim.

Dampak pandemi Covid-19 ini mengakibatkan melemahnya kinerja ekonomi di Provinsi Banten. Dari sektor pendapatan daerah, turun sebesar 70% yang semula 28 miliar per bulan menjadi 7 miliar per bulan (bantenprov.go.id, 2020). Dari sektor ketenagakerjaan, sebanyak 19.000 pekerja di wilayah Banten terkena PHK dan 30.000 pekerja lainnya dirumahkan (beritasatu.com, 2020). Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten juga melaporkan sebanyak 2.600 pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Banten terkena dampak Covid-19 dan Kota Tangerang merupakan yang terdampak paling banyak yaitu 770 UKM khususnya usaha di bidang kuliner (radarbanten.co.id, 2020). Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Banten pada tahun 2020 menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami peningkatan. Angka kemiskinan yang semula 0,98% menjadi 5,92% dibanding pada bulan September 2019 sebesar 4,94%.

Kemudian, jumlah pengangguran di Banten menjadi urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan total pengangguran mencapai 661 ribu orang atau 10,64% (bps.banten.go.id, 2020).

Mewabahnya virus Covid-19 juga berdampak pada menurunnya tingkat hunian dan pendapatan di sektor industri perhotelan dan restoran khususnya di wilayah pesisir pantai Anyer dan Carita. Tidak hanya industri perhotelan dan restoran, dampak Covid-19 pun dirasakan oleh industri media yang hampir sebagian besar melakukan perampingan manajemen (dewanpers.or.id, 2020). Di sektor pendidikan, sistem pembelajaran di institusi pendidikan di Provinsi Banten juga terkena imbas Covid-19 diantaranya meniadakan pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran daring (E-Learning). Kebijakan ini mengalami berbagai kendala karena belum meratanya akses internet di Provinsi Banten khususnya di wilayah pedesaan seperti di Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang. Kendala selanjutnya adalah pihak orang tua belum mengerti dengan teknologi secara maksimal khususnya untuk siswa Sekolah Dasar yang masih memerlukan pendampingan (Juhaeriah, 2020). Bahkan tidak semua keluarga memiliki fasilitas pendukung pembelajaran online yang memadai seperti gadget, koneksi internet, bahkan listrik.

Komunikasi risiko menjadi pendekatan komunikasi yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (KEPMENKES) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Surat tersebut mencantumkan poin komunikasi risiko sebagai salah satu langkah penanggulangan pandemi. yang berbunyi "komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit" (Kemenkes RI, 2020). Komunikasi risiko juga tercantum dalam Pedoman Pencegahan dan Penanganan Covid 19 dari Kemenkes RI yang mengadopsi panduan dari WHO berjudul Risk Communication and Community Engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV).

Pemerintah sebagai leading sector memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan komunikasi risiko baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Dalam bencana wabah Covid-19, tugas ini ditangani oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah. Di Provinsi Banten, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di dalamnya melibatkan lima pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, industri, peneliti/akademisi, media massa, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki perannya masing-masing dalam penanggulangan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi risiko dalam penanggulangan

wabah Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder di Provinsi banten dengan landasan teori yang digunakan adalah model komunikasi risiko William Leiss. Model ini menggambarkan aliran informasi dalam manajemen risiko diantara pemerintah, para ahli, kelompok advokasi, industri, media massa, serta masyarakat umum (Leiss, 1994). Menurut Badri (2018), jalur komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus dibangun di antara ruang ahli (pemerintah, ilmuwan, korporasi) dan ruang publik (kelompok advokasi, media massa, dan masyarakat). Penanggulangan risiko bencana wabah Covid-19 memerlukan dialog dengan para pemangku kepentingan yang terdampak untuk menggali berbagai persepsi risiko dan memperkaya opsi pengelolaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan model komunikasi risiko dari William Leiss. Dalam model ini, komunikasi risiko merupakan aliran informasi dalam manajemen risiko diantara pemerintah, para ahli, kelompok advokasi, industri, media massa, serta masyarakat umum (Leiss, 1994). Menurut Badri (2018), jalur komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus dibangun di antara ruang ahli (pemerintah, ilmuwan, korporasi) dan ruang publik (kelompok advokasi, media massa, dan masyarakat). Komunikasi risiko merupakan proses pertukaran tentang bagaimana sebaiknya menilai dan mengelola risiko diantara akademisi, pejabat pemerintah, industri, dan masyarakat (Powell & Leiss, 2001).

Dalam riset Park dan Sohn (2013) juga menjelaskan bahwa untuk menciptakan komunikasi risiko yang efektif harus ada kolaborasi dan komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, para ahli, dan industri terkait. Sedangkan menurut WHO, komunikasi risiko merupakan pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara para pengkaji risiko, manajer risiko, konsumen dan berbagai pihak lain yang berkepentingan (Husein & Onasis, 2017). Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi risiko menekankan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan komunikasi yang transparan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman mengenai risiko dan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam menentukan strategi pengelolaan risiko. Informasi yang tersedia harus bermakna, relevan, akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Penilaian risiko, cara mengendalikan risiko, dan kebijakan yang akan diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua aktor komunikasi risiko yang terlibat sehingga semua pihak memperoleh informasi yang cukup mengenai bahaya, cara pencegahan serta tindakan yang harus dilakukan (Kristanti, 2018).

Dalam kerangka tata kelola risiko, semakin kompleks, tidak pasti, dan ambigu, maka semakin banyak pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan (Badri, 2020). Komunikasi risiko memerlukan

komunikasi dua arah, interaktif, dan bersifat jangka panjang bersama masyarakat dan komunikator melalui dialog (Husein & Onasis, 2017). Dalam komunikasi risiko penanggulangan wabah Covid-19 memerlukan dialog dengan para pemangku kepentingan yang berdampak untuk menggali berbagai persepsi risiko dan memperkaya opsi pengelolaannya. Penanggulangan wabah Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada kebersamaan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Agar komunikasi risiko berhasil, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Menurut Husein & Onasis (2017) prinsip-prinsip dasar komunikasi risiko diantaranya adalah mengenali audiens, melibatkan pakar ilmiah, ahli dalam berkomunikasi, menjadi sumber informasi terpercaya, tanggung jawab bersama, dan menjamin keterbukaan.

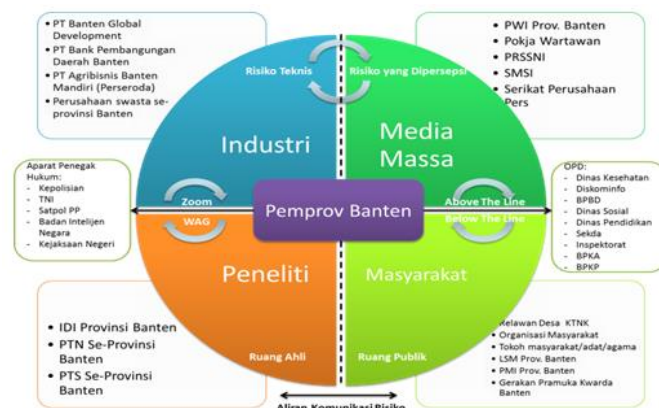
HASIL

Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Risiko Wabah Covid-19

Dalam penanggulangan risiko wabah Covid-19, Pemprov Banten melibatkan lima aktor komunikasi risiko diantaranya pemerintah, industri, peneliti/akademisi, media massa, dan masyarakat yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi risiko yang digagas oleh William Leiss, dimana jalur komunikasi risiko yang efektif dan terbuka harus dibangun di antara ruang ahli dan ruang publik (Badri, 2018). Pemerintah, ilmuwan, dan korporasi ditempatkan di ruang ahli sebagai aktor yang dianggap sebagai sumber terpercaya karena memiliki teknik dan keahlian untuk menilai dan memutuskan suatu kebijakan. Sedangkan media massa dan masyarakat ditempatkan di ruang publik sebagai aktor yang memberikan persepsi/respon terhadap kebijakan yang dibuat oleh para aktor di ruang ahli sehingga mempengaruhi perilaku/tindakan mereka. Oleh karenanya, komunikasi risiko harus dibangun melalui dialog dengan para pemangku kepentingan untuk menggali berbagai persepsi risiko dan memperkaya opsi pengelolaannya.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruhnya terhadap suatu isu, stakeholder Pemprov Banten dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu stakeholder kunci, utama, dan sekunder. Pemprov Banten sebagai leading sector merupakan stakeholder kunci dalam penanganan Covid-19 karena memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian, stakeholder utama Pemprov Banten adalah masyarakat, karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah dan ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Adapun stakeholder pendukung Pemprov Banten adalah aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

perguruan tinggi, badan usaha, dan media massa karena kelompok ini memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga suara mereka berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan pemerintah.



Sumber: data olahan

Gambar 1

Model Komunikasi Risiko Penanggulangan Covid-19 Provinsi Banten

Figure 1 menunjukkan aliran komunikasi penanggulangan risiko Covid-19 Provinsi Banten. Dalam aliran komunikasi tersebut, para pemangku kepentingan tergabung dalam Forum Satgas Covid-19 Provinsi Banten dimana sebagian besar komunikasi dan koordinasi dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp Grup. Koordinasi Satgas Covid-19 Provinsi Banten berupa Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Evaluasi baik dengan pemerintah pusat dan maupun dengan pemerintah kab/kota. Setiap anggota Satgas Covid-19 memiliki perannya masing-masing dalam penanggulangan risiko. Di sektor pemerintahan, yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah menjalankan perannya mulai dari upaya pencegahan hingga pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah yang paling disorot sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengurus masalah kesehatan masyarakat; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten berfokus pada upaya pencegahan dan penegakkan disiplin prokes; Dinas Sosial Provinsi Banten berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat; Dinas Komunikasi dan Informatika berfokus pada penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat; dan aparat penegak hukum bertugas pada penegakkan disiplin protokol kesehatan masyarakat.

Di sektor industri, sejumlah korporasi di Provinsi Banten turut ambil peran dalam penanganan Covid-19 sebagai donatur untuk mendukung ketersediaan layanan kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat serta membantu pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan di internal perusahaan. Kontribusi ini merupakan wujud tanggung jawab sosial dan upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat. Meskipun sektor ini terkena dampak,

industri tetap harus memberikan dampak positif bagi stakeholder lainnya. Menurut Rahman, dkk. (2020), keterlibatan pihak industri dapat meringankan beban anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten juga berperan dalam memulihkan perekonomian daerah. Menurut Kamaluddin (2001), BUMD memiliki dua peran yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan. Adapun BUMD yang terlibat yaitu PT Banten Global Development, PT Bank Pembangunan Daerah, dan PT Agribisnis Mandiri (Perseroda).

Di sektor akademisi dalam hal ini perguruan tinggi, ranah perannya dalam konteks penanganan Covid-19 adalah terkait aspek pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat (Mahfud, 2020). Dalam buku Panduan Kemitraan Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (2020), spektrum kemitraan pemerintah dan lembaga penelitian termasuk ke dalam kategori Leverage/Exchange, dimana keduanya harus saling mendukung dan melengkapi melalui penyediaan sumber daya masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan). Peran dan kontribusi perguruan tinggi di Banten dalam penanganan Covid-19 hanya aktif pada aspek pendidikan dan pengabdian masyarakat, sedangkan aspek riset dan inovasi kurang berkontribusi. Pada spektrum kemitraan ini, pemerintah seharusnya memanfaatkan keahlian dan hasil penelitian dari para ilmuwan serta menyediakan dana penelitian, sumber data, dan bahan studi kasus kepada lembaga penelitian (Kemenkes RI, 2020). Pielke (2007) mengatakan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan dan berperan sebagai sumber daya kunci untuk memfasilitasi keputusan sulit.

Contoh di Surabaya, keterlibatan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Universitas Airlangga berkolaborasi dalam pengembangan inovasi teknologi robot untuk merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kemudian kolaborasi Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor menemukan kandungan zat yang bisa menjadi antivirus Covid-19. Alat deteksi GeNose C-19 yang diciptakan Universitas Gajah Mada, dan masih banyak lagi. Ilmuwan di Provinsi Banten masih dianggap sebagai pure scientist dimana karya ilmiah yang dihasilkan hanya sebatas untuk kepentingan publikasi ilmiah saja tanpa berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan. Hal ini senada dengan pendapat Nurfatriani, dkk., (2018) dalam risetnya bahwa para ilmuwan merupakan aktor yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap suatu isu namun memiliki power yang rendah dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Maka dari itu perlu peningkatan peran ilmuwan di Provinsi Banten sebagai honest broker of policy alternatives dimana mereka terlibat secara langsung dan

berpengaruh tinggi dalam perumusan kebijakan pemerintah (Pielka, 2017).

Selanjutnya adalah media massa. Pemprov Banten mengoptimalkan media relations dengan menggelontorkan dana khusus untuk kegiatan publikasi Covid-19 dan bekerjasama dengan asosiasi profesi wartawan dari berbagai jenis media diantaranya PWI, Pokja Wartawan, PRSSNI, SMSI, dan Serikat Perusahaan Pers. Media massa merupakan salah satu stakeholder penting dalam membantu penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Menurut McQuail (2005), media massa merupakan pemangku kepentingan yang beroperasi di ruang publik yang kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasinya bersifat profesional, terarah, serta bebas nilai kepentingan. Berdasarkan pendapat McQuail tersebut berarti media yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial, ekonomi, maupun politik akan lebih mengedepankan transparansi informasi kepada khalayak.

Media massa di Provinsi Banten berperan dalam sirkulasi informasi terkait pandemi Covid-19 yang dapat menyebar dengan cepat dari level pusat hingga level individu. Namun, media massa memiliki dua sisi mata pisau, satu sisi positif jika informasi digunakan dengan baik misalnya informasi yang berisi edukasi tentang virus Covid-19, gejala dan cara pencegahan, menyajikan kabar kasus Covid-19, dll. Kemudian di sisi lain media massa bisa menjadi negatif apabila informasi yang disebarkan adalah hoaks (tidak benar), menakut-nakuti, dan menimbulkan keresahan di masyarakat (Akbar, 2021). Lukas Ispandriarno, seorang pakar komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta mengkategorikan dua tipe media di masa pandemi Covid-19. Media tipe pertama yaitu media yang serius ingin memberikan informasi yang benar dan terverifikasi. Sedangkan media tipe kedua yaitu media yang memanfaatkan isu virus Covid-19 untuk mendongkrak khalayak. Untuk media tipe kedua, biasanya gemar menampilkan judul berita sensasional yang mudah viral dan membuat kaget pembaca. Selain itu, media tersebut juga kurang melakukan verifikasi ketika mengutip informasi (voaindonesia, 2020).

Pada situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang sudah mencapai titik kritis, peran media sebagai sumber informasi, edukasi dan solusi justru perannya menjadi salah di mata masyarakat. Hal ini senada dalam laporan Edelman Trust Barometer pada tahun 2019 bahwa media masih menjadi pihak yang paling kurang dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat sudah berada pada titik jenuh karena media dianggap menakut-nakuti dan menimbulkan keresahan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa media massa di Provinsi Banten belum menonjolkan perannya dalam mendidik publik dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurut Bafadhal & Santoso (2020), Facebook dan WhatsApp adalah dua media sosial yang paling sering digunakan

untuk membagikan disinformasi. VOA Indonesia (2020) dalam artikelnya juga menyebutkan bahwa masyarakat lebih mudah mempercayai informasi hoaks yang disebarkan melalui media sosial namun ketika diberikan informasi dan edukasi melalui media massa justru memberikan respon sebaliknya. Data dari Central Connecticut State University (CCSU) juga menyebut tingkat literasi Indonesia menempati peringkat terendah kedua di dunia. Sementara menurut survei Centre for International Governance Innovation (CIGI), sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia dinilai lebih percaya hoaks dan kabar bohong. Menurut Ali (2017), informasi hoaks memang cenderung menohok sentimen paling sensitif dalam diri masyarakat sehingga informasi tersebut seakan-akan benar menurut asumsi penerimanya.

Pada akhirnya, tantangan saat ini bukan hanya melawan pandemi tetapi juga infodemi. Infodemi merupakan istilah yang merujuk pada 'wabah' berupa informasi palsu dan menyesatkan yang dapat tersebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Dampaknya adalah masyarakat mudah dipengaruhi dan terombang-ambing dalam disinformasi yang berpotensi membahayakan keselamatan diri. Menurut Nugraha (2020), hoaks dan disinformasi adalah musuh masyarakat dan negara. Pada level masyarakat, dampaknya akan membuat perselisihan antar individu atas perbedaan asumsi baik di dunia online maupun nyata. Sedangkan pada level negara, akan mengacaukan stabilitas sosial-politik dan merusak wibawa pemerintah. Oleh karenanya, Pemprov Banten perlu memonitoring kinerja media dan menyediakan fitur atau program khusus dengan memanfaatkan laman web maupun media sosial untuk menangkali informasi hoaks yang beredar di masyarakat.

Terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder utama pemerintah karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah dan ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam upaya penanggulangan risiko Covid-19, Pemprov Banten memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa agar mampu berperan serta dalam mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya. Upaya tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Wujud dari program ini adalah dengan membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya. Program pemberdayaan masyarakat ini

dilakukan untuk mengawasi dan mengecek penerapan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa. Program ini membantu Pemprov Banten dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, program ini juga berperan dalam membantu mengkoordinasikan penyaluran bantuan logistik bagi warga desa yang terdampak. Hal ini sesuai dengan Panduan Kemitraan Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Kemenkes RI, 2020) bahwa seluruh organisasi perangkat daerah membutuhkan dukungan dari organisasi di bawahnya yaitu di level kabupaten/kota, level kecamatan hingga level desa yang diharapkan dapat menanggulangi Covid-19 secara lebih komprehensif. Namun, program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan Covid-19 ini belum merata dilakukan oleh semua desa di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan sejumlah desa memiliki keterbatasan anggaran serta belum meratanya pembagian dana operasional dari pemerintah sehingga sulit untuk mendirikan program tersebut. Selain itu, data penerima bantuan sosial untuk warga terdampak juga tidak valid sehingga penyaluran bantuan belum terakodomir dengan baik.

Dalam Panduan Protokol Komunikasi Publik (2020), komunikasi risiko Covid-19 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan paham akan risiko kesehatan serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan di lingkungan terdekatnya. Pengkomunikasian risiko ini juga harus mampu membangun persepsi masyarakat bahwa pemerintah hadir dan tanggap dalam mengendalikan wabah. Berdasarkan pengamatan penulis, kegiatan komunikasi publik Pemprov Banten sebagian besar hanya menginformasikan data perkembangan kasus Covid-19. Padahal, berdasarkan Panduan Protokol Komunikasi Publik (2020), seluruh pemerintah daerah harus mensosialisasikan informasi dan materi mengenai pengetahuan tentang virus Covid-19, penjelasan tentang cara pencegahan, kriteria pasien, kesiapan logistik dan pangan, daftar laboratorium dan rumah sakit rujukan, fasilitas hotline, klarifikasi hoax dan disinformasi. Selain itu, komunikasi publik juga dilakukan untuk membangun public trust dengan cara membuat konten yang mampu menciptakan ketertarikan (engaging) dengan narasi yang positif, menggunakan platform yang kredibel, dan rajin memperbarui informasi secara berkelanjutan kepada masyarakat (PR Indonesia, 2020).

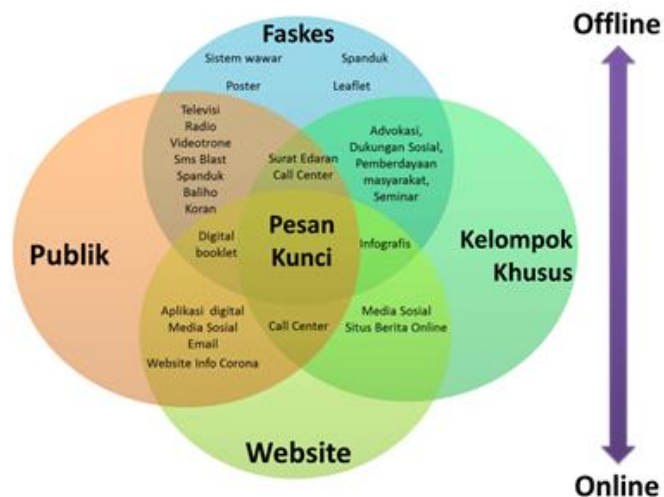
Kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemprov Banten kurang responsif dalam mengikuti trend dan opini yang sedang dibicarakan oleh khalayak terkait Covid-19 seperti informasi mengenai virus varian terbaru, vaksin, kebijakan pemerintah, dll. Fakta tersebut disampaikan di laman bantennews.co.id (2021) bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Banten dinilai buruk oleh warganet. Berdasarkan pengamatan penulis di media sosial Instagram @dinkes_prov Banten,

beberapa warganet memberikan kritik karena akun media sosial Pemprov Banten kurang informatif. Kegiatan komunikasi publik Pemprov Banten juga kurang hadir dalam menyanggah dan mengklarifikasi hoaks dan disinformasi yang beredar. Apabila Pemprov Banten sebagai otoritas yang seharusnya dapat diandalkan absen dalam meluruskan informasi, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya dapat memperparah dan menghambat proses penanganan pandemi. Kita bisa mengambil contoh platform untuk menangkal hoaks dan disinformasi seperti di laman web covid19.go.id yang menyediakan portal Hoax Buster. Di media daring seperti Tempo, Liputan6, dan Merdeka juga menyediakan fitur Cek Fakta. Beberapa berita hoaks juga diklarifikasi oleh komunitas dalam Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax.

Kegiatan komunikasi publik selanjutnya adalah menunjuk juru bicara. Juru bicara Pemprov Banten diambil dari unsur yang mengerti tentang masalah kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Juru bicara Covid-19 bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah dalam penanganan Covid-19 kepada masyarakat dan media melalui konferensi pers atau wawancara. Juru bicara dijadikan sebagai rujukan utama bagi masyarakat sehingga informasi didapatkan hanya dari satu pintu. Namun pada praktiknya, masih kurang adanya sinergi antara juru bicara Covid-19 Provinsi Banten dengan para wartawan. Mengutip dari laman berita bantennews.co.id (2021), pertanyaan wartawan yang disampaikan melalui WhatsApp Grup Media Center Satgas Covid-19 Banten jarang direspon oleh juru bicara sehingga para wartawan kesulitan menggali informasi mengenai perkembangan Covid-19 di Provinsi Banten. Hal ini berarti peran Juru Bicara Covid-19 Provinsi Banten masih belum sesuai dengan panduan protokol komunikasi publik dimana seorang juru bicara harus bertanggung jawab sebagai penyampai informasi dan harus memiliki kemampuan dalam menghadapi media.

Selanjutnya, Pemprov Banten juga mendirikan Media Center Covid-19 yang berfungsi untuk menghimpun, mengolah, menyediakan, serta menyebarkan informasi Covid-19 kepada masyarakat. Media center ini juga dapat menampung umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemprov Banten membuat Media Center Covid-19 dengan membuat situs web khusus Covid-19 di laman www.infocorona.bantenprov.go.id yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Banten. Website ini berisi peta sebaran Covid-19, kebijakan dan regulasi, materi edukasi dan sosialisasi, laporan donasi, layanan rapid test, layanan hotline, dan survei kuesioner.

Pemanfaatan Media Untuk Promosi Kesehatan Masyarakat dalam Penanggulangan Risiko Wabah Covid-19 di Provinsi Banten



Sumber: data olahan

Gambar 2
Bentangan Media Promosi Kesehatan Covid-19 Provinsi Banten

Promosi kesehatan tidak terlepas dari penggunaan media karena pesan yang disampaikan akan lebih terlihat menarik dan mudah dipahami oleh khalayak. Penggunaan media dalam promosi kesehatan berarti semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang diharapkan dapat merubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatannya (Susilowati, 2016). Dalam upaya mewujudkan promosi kesehatan dapat dilakukan melalui strategi yang baik. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam promosi kesehatan (Notoadmodjo, 2012).

Strategi media promosi kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Banten menggunakan strategi media above the line dan below the line. Media Above The Line (ATL) adalah aktifitas promosi sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan dan bersifat tidak langsung terhadap audiens. Media Above The Line yang digunakan oleh Pemprov Banten diantaranya televisi, radio, surat kabar, videotron, spanduk, baleho, banner, poster, leaflet, booklet, majalah internal, sms blast, situs berita online, media sosial dan website. Adapun Media Below The Line adalah aktifitas promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk merangkul audiens sasaran agar aware dengan produk/pesan yang dipromosikan dan bersifat langsung terhadap audiens. Media Below The Line yang digunakan oleh Pemprov Banten adalah mengikuti panduan strategi promosi kesehatan WHO yaitu advokasi (advocacy), dukungan sosial (Social Support), dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment).

Jika mengacu pada Panduan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Kemenkes RI, 2020), pemanfaatan media promosi kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Banten menggunakan media

offline dan online (fig.3). Secara offline berarti semua kegiatan komunikasi yang tidak dimediasi oleh internet. Penggunaan media offline bersifat tradisional seperti spanduk, banner, baleho, poster, leaflet, koran, majalah internal dan videotron. Adapun media online berarti kegiatan komunikasinya menggunakan sambungan internet diantaranya website, media sosial (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter) dan media yang lebih personal yaitu WhatsApp. Tujuan akhir dari promosi kesehatan Covid-19 adalah tercapainya perubahan perilaku kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, perilaku individu ditentukan oleh banyak faktor. Menurut teori Lawrence Green, perilaku individu ditentukan oleh tiga faktor yaitu predisposisi, pemungkin, dan penguat (Hasnidar, dkk., 2020). Faktor predisposisi yaitu faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keyakinan atau kepercayaan individu. Faktor pemungkin yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor penguat yaitu faktor yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mendorong individu melakukan upaya-upaya kesehatan.

Di Provinsi Banten, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih abai menerapkan protokol kesehatan yaitu faktor tingkat pengetahuan, ketersediaan sarana prasarana, dan pengaruh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian BPK dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 80,6% responden menyatakan bahwa informasi dan promosi kesehatan mudah diingat, dipahami, dan sering menerima informasi tersebut. Artinya secara tidak langsung tingkat pengetahuan masyarakat sudah cukup tinggi. Namun jika mengacu pada teori Lawrence Green, bahwa faktor pengetahuan masih perlu didukung oleh faktor sarana prasarana dan faktor pendorong. Faktor sarana prasarana berarti berbicara mengenai ketersediaan alat pelindung diri yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara faktor pendorong berarti masih diperlukan penguatan dari pendorong upaya-upaya kesehatan seperti regulasi dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.

Dalam mewujudkan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, juga diperlukan pendekatan komunikasi yang tepat. Pendekatan komunikasi didefinisikan sebagai teknik komunikasi untuk menyampaikan pesan, informasi, ide, pemikiran, dan sebagainya melalui saluran komunikasi tertentu dengan tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain (pakarkomunikasi.com, 2020). Pendekatan komunikasi yang dilakukan Satgas Covid-19 Provinsi Banten menggunakan pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif dan pervasif. Bersifat persuasif berarti penyampaian pesannya kepada orang lain dilakukan secara halus dan tanpa paksaan. Sementara pendekatan bersifat pervasif berarti penyampaian pesan dilakukan secara berulang-ulang agar terjadi pembentukan sikap dan kepribadian. Selain itu, Satgas Covid-19 Provinsi Banten menerapkan tiga cara intervensi perilaku yaitu

education (edukasi), engineering (rekayasa), dan enforcement (penegakkan disiplin).

Education yaitu upaya mendidik masyarakat melalui penyampaian pesan dan informasi sehingga menambah pengetahuan mereka mengenai Covid-19. Upaya ini dilakukan pada pemberian sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, pelatihan protokol pengurusan jenazah, dan pentingnya vaksin Covid-19 yang disampaikan melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan engineering atau rekayasa untuk pengendalian penyakit Covid-19 seperti memberikan tanda silang di tempat duduk sebagai wujud dari kebijakan PSBB agar masyarakat tidak berkerumun dan menjaga jarak. Terakhir adalah enforcement atau penegakkan disiplin dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hukuman yang dilakukan berupa denda dan hukuman sosial. Keberadaan influencer juga memiliki peranan penting di tengah Pandemi Covid-19 sebagai komunikator persuasif untuk mengkampanyekan pesan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat. Influencer didefinisikan sebagai orang yang memiliki banyak pengikut serta pengaruh yang kuat (Alam, 2020). Sugiharto, dkk. (2018) mengatakan bahwa perkataan seorang influencer dapat memengaruhi orang lain. Sosok influencer dianggap memiliki kredibilitas, dapat dipercaya, mudah dijangkau karena adanya interaksi dengan publik (Evelina & Handayani, 2018). Saat ini, influencer tidak hanya menyediakan jasa untuk mengenalkan produk namun bisa berperan juga dalam memberikan informasi positif kepada publik. Tokoh-tokoh yang biasanya menjadi influencer adalah artis, selebgram, youtuber atau public figure.

Influencer tidak hanya mampu mempengaruhi pengikutnya tetapi mereka juga dianggap sebagai panutan dari sikap dan perilakunya (Alam, 2020). Tokoh masyarakat atau tokoh agama merupakan salah satu figur yang tidak hanya memiliki pengaruh, tetapi juga dapat menjadi teladan di masyarakat seperti ulama, ustadz di kampung, pendeta atau ketua adat. Tokoh-tokoh tersebut lebih dekat secara emosional dan lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Strategi ini dipakai oleh Pemprov Banten dengan memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai influencer. Selain lebih dekat dengan masyarakat, juga lebih efisien secara biaya dibandingkan menggandeng influencer di kalangan selebriti. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa influencer dari tokoh nasional justru kurang mampu menggerakkan kalangan masyarakat akar rumput (grassroot) yang biasanya tidak terjamah (voi.id, 2021). Survei SMRC pada Desember 2020 menyebut tokoh agama sebagai yang paling dipercaya menjelaskan pencegahan Covid-19, setelah dokter dan presiden. Survei Nasional Literasi Digital Indonesia (Kominfo, 2020) juga menunjukkan bahwa tokoh agama menjadi sumber informasi yang paling dipercaya.

Hambatan Penanggulangan Risiko Wabah Covid-19 di Provinsi Banten

Keterbatasan Anggaran Daerah

Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan penanganan Covid-19. Keterbatasan ini dirasakan oleh Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang. Pemkab Pandeglang mengalami keterbatasan anggaran dalam hal pengadaan sarana kesehatan dan biaya publikasi. Sedangkan Pemkab Serang juga mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu melaksanakan kebijakan PSBB karena pertimbangan luasnya wilayah dan risiko ekonomi yang akan diterima masyarakat.

Keterbatasan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar dalam penanganan Covid-19. Katadata Insight Center (2020) dalam risetnya menyebutkan bahwa Banten merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap Covid-19 ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai. Tingginya jumlah penduduk Banten tidak sebanding dengan kondisi layanan kesehatan yang relatif minim. Dosen Kedokteran Untirta, dr. Rukman Abdullah berpendapat Banten masih tergolong belum siap sarana dan tenaga kesehatan apabila terjadi lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di India. Misalnya di Kab. Pandeglang, Juru Bicara Covid-19 Kab. Pandeglang mengatakan kondisi fasilitas kesehatan di wilayahnya sangat terbatas karena hanya tersedia satu rumah sakit dan tidak bisa dijadikan rumah sakit rujukan Covid-19 karena mempertimbangkan pasien umum. Selain kurangnya fasilitas kesehatan, sebagian besar masyarakat Kab. Pandeglang juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan sehingga sulit menjangkau akses menuju fasilitas kesehatan. Kesulitan ini dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok desa salah satunya adalah Desa Medong di Kec. Mekarjaya, Pandeglang.

Kurangnya Tenaga Kesehatan

Faktor penunjang lainnya dalam penanganan Covid-19 adalah ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, petugas laboratorium, ahli gizi, dsb. Berdasarkan riset yang dilakukan Sjafari, dkk. (2020) berjudul Analisis Peningkatan Indeks Pembangunan Bidang Kesehatan Provinsi Banten, kebutuhan tenaga kesehatan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena jumlahnya masih kurang dan masih perlu pendistribusian tenaga kesehatan secara proporsial di masing-masing kab/kota. Menurut Sjafari, dkk. tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80 persen dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Fakta tersebut dikuatkan oleh Juru Bicara Covid-19 Kab. Pandeglang yang mengatakan bahwa selain kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan di Pandeglang juga sedikit. Hasil kajian yang dilakukan

oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten di Kab. Lebak juga melaporkan temuan bahwa masih terdapat beberapa wilayah di Lebak yang kesulitan mengakses layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai khususnya bagi masyarakat marjinal. Salah satu temuannya menyebutkan Puskesmas hanya berada di pusat kecamatan serta Pusat Kesehatan di Desa (Puskesmas) tidak semua beroperasi karena tidak adanya tenaga kesehatan (ombudsman.go.id, 2020).

Ragamnya Persepsi Masyarakat

Salah satu permasalahan dalam komunikasi risiko adalah permasalahan pada penerima, dimana terjadi perbedaan persepsi setiap individu dalam menerima pesan risiko. Masyarakat memiliki beragam persepsi tentang Covid-19, ada yang percaya dan tidak percaya. Persepsi ini akan berpengaruh pada tindakan/perilaku masyarakat. Di Kab. Pandeglang yang notabene masyarakatnya adalah kelompok santri dan ulama, menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi Covid-19. Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Banten menyebutkan ada sebanyak 20 pondok pesantren yang terpapar virus Covid-19 salah satunya adalah di Kab. Pandeglang (kompas.com, 2020). Maliki (2020) dalam jurnal yang ditulisnya berjudul Covid-19, Agama, dan Sains memaparkan tentang kelompok beragama yang ignore terhadap Covid-19, atau dengan kata lain kelompok ini konservatif dan anti-sains. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Promkes, Dinas Kesehatan Provinsi Banten bahwa kemauan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih menjadi hambatan selama melakukan promosi kesehatan.

Komunikator Kurang Kompeten

Menurut Husein & Onasis (2017), salah satu prinsip keberhasilan dalam komunikasi risiko adalah mempunyai keahlian dalam mengkomunikasikan pesan-pesan risiko kepada masyarakat. Keahlian ini perlu dikembangkan melalui pelatihan dan banyaknya pengalaman. Juru Bicara Covid-19 Kab. Pandeglang berpendapat puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat agar terjadi perubahan perilaku. Namun, tidak semua orang memiliki keahlian komunikasi yang baik. Jika pendekatan komunikasinya kurang tepat, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat.

Tindakan Korupsi

Penggunaan anggaran penanganan Covid-19 rentan terjadi korupsi di berbagai daerah termasuk di Provinsi Banten. Timbulnya tindakan korupsi dikarenakan minimnya transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus korupsi di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Banten diantaranya korupsi bansos dan korupsi pengadaan APD. Pada kasus bansos, titik korupsi berada pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta lemahnya pengawasan. Akibatnya, penyaluran bansos

tidak tepat sasaran bahkan tidak sampai ke tangan penerima manfaat. Sedangkan pada kasus pengadaan APD, titik korupsi berada pada mark-up harga.

SIMPULAN

Komunikasi risiko yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam penanggulangan wabah Covid-19 sesuai dengan model komunikasi risiko William Leiss melibatkan berbagai stakeholder dari lintas sektor diantaranya industri, akademisi/peneliti, media massa, dan masyarakat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten. Koordinasi antar stakeholder sebagian besar dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp berupa rapat koordinasi dan rapat evaluasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kab/kota. Strategi promosi kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Banten menggunakan media above the line dan below the line dengan pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif dan pervasif. Adapun untuk intervensi perilaku dilakukan dengan tiga cara yaitu mendidik (education), rekayasa (engineering), dan penegakkan disiplin (enforcement). Selain itu, Pemprov Banten juga memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai influencer karena lebih dekat secara emosional dengan masyarakat dan lebih efisien secara biaya. Pelaksanaan penanggulangan risiko wabah Covid-19 di Provinsi Banten mengalami berbagai hambatan diantaranya terbatasnya anggaran daerah, kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis, ragamnya persepsi masyarakat, komunikator kurang kompeten, dan tindakan korupsi. Selain itu, pelaksanaan komunikasi penanggulangan risiko Covid-19 di Provinsi Banten masih dikatakan belum efektif karena masih ditemukan cara pengimplementasian yang belum maksimal dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Syarifuddin. 2021. Media Komunikasi dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1)

Alam, Sukma. 2020. Peran Influencer Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid-19. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 8(2)

Antara News. 2020. Tangerang Raya Sumbang 75 Persen Positif Covid-19 di Banten. Retrieved on <https://banten.antaranews.com/amp/berita/129701/tangerang-raya-sumbang-75-persen-positif-covid-19-di-banten>

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2020. Persentase Penduduk Miskin Banten Naik Maret 2020 Naik. Retrieved on <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/543/persentase-penduduk-miskin-banten-maret-2020-naik-menjadi-5-92-persen.html#>

Badri, Muhammad. 2018. *Komunikasi Risiko dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Institut Pertanian Bogor

Bafadhal, Oemar Madri & Santoso, Anang Dwi. 2020. Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid-19 di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, dan Jenis Disinformasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(2)

Banten News. 2021. Melulu Pajang Foto WH Andika Medsos Dinkes Disindir Warganet Karena Kurang Informatif. Retrieved on www.bantennews.co.id/melulu-pajang-foto-wh-andika-medsos-dinkes-disindir-warganet-karena-kurang-informatif/

Berita Satu. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 19 Ribu Pekerja Terkena PHK di Banten. Retrieved on <https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/681859/dampak-pandemi-covid19-19-ribu-pekerja-terkena-phk-di-banten>

Crowley, David., Mitchell, David. 1994. *Communication Theory Today*. Stanford: Stanford University Press

Detik News. 2020. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI. Retrieved on <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Dewan Pers. 2020. Wajah Perusahaan Pers Cetak di Masa Pandemi Covid-19 Pendapatan Turun Drastis Hingga Merumahkan Karyawan. Retrieved on <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1581/Wajah-Perusahaan-Pers-Cetak-di-Masa-Pandemi-Covid-19-Pendapatan-Turun-Drastis-Hingga-Merumahkan-Karyawan>

Evelina, L. W., & Handayani, F. 2018. Penggunaan Digital Influencer dalam Promosi Produk. *Warta ISKI*, 1(1), 71

Hasnidar, dkk. 2020. *Ilmu Kesehatan Masyarakat. Medan: Yayasan Kita Menulis*

Husein, Achmad., Onasis, Aidil. 2017. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Tim P2M2

ILO Indonesia. 2020. Covid-19 Sebabkan Kehilangan Jam Kerja dan Pekerjaan. Retrieved on https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCM_S_741127/lang--en/index.htm

Juhaeriah. 2020. Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Kreatifitas Anak. Retrieved on <https://dpk.bantenprov.go.id/Layanan/topic/22/>

Kamaluddin, Rustian. 2001. Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Daerah. Retrieved on http://www.bappenas.go.id/files/3913/5022/6047/rustian__20091015125917__2359_0.pdf

Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Panduan Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Panduan Kemitraan Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- Kompas (Regional). 2020. Pondok Pesantren di Banten Terpapar Covid-19. Retrieved on <https://regional.kompas.com/read/2020/10/23/22471071/20-pondok-pesantren-di-banten-terpapar-covid-19>
- Kristanti, Lusiana Laras. 2018. Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Maliki, Musa. 2020. Covid-19, Agama, dan Sains. Ma'arif Institute. Retrieved on <https://jurnal-maarifinsitute.org>
- McQuail, Denis. 2005. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications
- Nugraha, Agung. 2020. Menangkal Pusaran Hoaks dan Disinformasi Saat Pandemi Covid-19. Retrieved on <https://ombudsman.go.id/artike/r/artikel---menangkal-pusaran-hoaks-dan-disinformasi-saat-pandemi-covid-19>
- Nurfatriani, Fitri., dkk. 2018. Peran Ilmuwan Dalam Pembuatan Kebijakan Fiskal Hijau: Studi Kasus Provinsi Jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kesehatan*. 15(1), 39-54
- Notoatmodjo, S. 2012. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ombudsman RI Kpw Banten. 2020. Ombudsman Banten Temukan Masyarakat Lebak Masih Kesulitan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan. Retrieved on <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan>
- Pakar Komunikasi. 2021. Pendekatan Komunikasi dalam Perubahan Sosial. Retrieved on www.pakarkomunikasi.com/pendekatan-komunikasi-dalam-perubahan-sosial/amp
- Pemprov Banten. 2020. Gubernur Banten Akui Pendapatan Daerah Turun. Retrieved on <https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/gubernur-banten-akui-pendapatan-daerah-turun>
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Pielke, R. A. 2007. *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy dan Politics*. New York: Cambridge University Press
- Powell D., W. Leiss. 2001. *Mad Cows and Mother's Milk. The Perils of Poor Risks Communication*. Canada: McGill – Queen's University Press
- Public Relations Indonesia. 2020. *Mengelola Pandemi Butuh Kepercayaan*. Edisi 63
- Radar Banten. 2020. Ribuan Pelaku UKM Terdampak Covid-19. <https://www.radarbanten.co.id/ribuan-pelaku-ukm-terdampak-covid-19/>
- Sjafari, Agus, Nugroho, Kandung Spto, Arenawati. 2020. Analisis Peningkatan Indeks Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi Banten. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*
- Sugiharto, S.A., & Ramadhana, M.R. 2018. Pengaruh Kredibilitas Influencer Terhadap Sikap Pada Merek. <https://doi.org/http/www.doi.ac.id/10.34010/JIP.SI.V8I2.1333>
- Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah
- Susilowati, Dwi. 2016. *Promosi Kesehatan*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kementerian Kesehatan RI
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- UNICEF Indonesia. *Sepertiga Anak Sekolah di Seluruh Dunia Tidak Bisa Mengakses Pembelajaran Jarak Jauh*. Retrieved on <https://www.unicef.org/indonesia/id.press-releases/covid-19-laporan-baru-unicef-mengungkap-setidaknya-sepertiga-anak-sekolah-di-seluruh>
- VOA Indonesia. 2020. Virus Corona di Media: Edukatif atau Bikin Panik. Retrieved on <https://www.voaindonesia.com/amp/virus-corona-di-media-edukatif-atau-bikin-panik-/5321258.html>
- VOI. 2021. Benarkah Ketokohan Seseorang Bisa Membuat Masyarakat Mau di Vaksin Covid-19. Retrieved on <https://voi.id/amp/41504/benarkah>

ketokohan-seseorang-bisa-membuat-masyarakat-
mau-divaksin-covid-19

WHO. 2020. *Materi Komunikasi Risiko Covid-19 Untuk
Pelayanan Kesehatan*